

PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Muhammad Naufal Fazari

NPP. 32.0729

Asdaf Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0729@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Robert Simbolon, MPA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The high and complex workload at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Kotawaringin Barat Regency poses significant challenges to the effectiveness of Civil Servants (PNS) in carrying out their duties. Although most employees have high educational qualifications and the agency's performance is relatively good, the limited number of personnel and difficulties in inter-agency coordination have led to uneven workload distribution. This condition potentially undermines the quality of regional planning and development implementation. **Purpose:** This study aims to identify and describe the implementation of civil servants' workload at Bappeda of Kotawaringin Barat Regency. **Method:** The research employs a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. **Results:** The study reveals that the workload at Bappeda is considerably high and complex, with many employees working beyond the standard working hours to meet targets. The main obstacles identified are the limited number of human resources and the lack of effective inter-agency coordination. Strategic efforts include recruiting competent honorary staff and enhancing cross-sector collaboration to reduce sectoral egos. **Conclusion:** The management of tourism sector levies in West Kotawaringin Regency has been running well. However, several obstacles are still found, for this reason it is necessary to strengthen cooperation between agencies, implement a digital system in managing levies, and increase socialization to the community regarding the importance of levies as a source of financing for regional development.*

Keywords: *Management of Retribution, Tourism Sector, Local Original Income*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun daerah ini memiliki berbagai objek wisata menarik seperti Taman Nasional Tanjung Puting dan Pantai Kubu, kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih sangat rendah. Data menunjukkan bahwa realisasi retribusi tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dalam lima tahun terakhir, dengan kontribusi tidak pernah melebihi 1% dari total PAD. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan retribusi pariwisata. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. **Hasil:** Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, belum diterapkannya sistem digital, serta kurangnya sinkronisasi antara Dinas Pariwisata dan Badan Pendapatan Daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti pembaruan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan diversifikasi produk wisata untuk meningkatkan PAD. **Kesimpulan:** Pengelolaan

retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berjalan dengan baik. Namun masih ditemukan beberapa hambatan, untuk itu perlunya penguatan kerjasama antarinstansi, penerapan sistem digital dalam pengelolaan retribusi, dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya retribusi sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah.

Kata Kunci: Pengelolaan Retribusi, Sektor Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata telah menjadi salah satu andalan pembangunan ekonomi daerah karena mampu memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menggali potensi unggulan yang dimiliki, salah satunya melalui pengelolaan retribusi sektor pariwisata. Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Kalimantan Tengah, memiliki berbagai destinasi unggulan seperti Taman Nasional Tanjung Puting, Pantai Kubu, dan Istana Kuning. Keberadaan tempat-tempat wisata ini menarik ribuan wisatawan setiap tahun, baik domestik maupun mancanegara.

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih sangat rendah. Data Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir (2019–2023), capaian retribusi sektor pariwisata tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 misalnya, dari target Rp1.000.000.000, realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp527.856.000 atau sekitar 52,7%. Bahkan kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap keseluruhan PAD tidak pernah melebihi 1%. Padahal secara teoritis, semakin tinggi jumlah wisatawan seharusnya diikuti oleh peningkatan penerimaan retribusi daerah, khususnya dari sektor pariwisata. Hal ini sejalan dengan temuan analisis utama Castilho & Fuinhas(2025) yang menunjukkan bahwa investasi modal pariwisata, kedatangan wisatawan internasional berkontribusi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di seluruh wilayah UE.

Permasalahan ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan retribusi pariwisata. Beberapa faktor turut memengaruhi, antara lain perencanaan yang belum komprehensif, belum tersedianya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus yang menangani retribusi pariwisata, belum diterapkannya sistem digital dalam proses pemungutan retribusi, hingga lemahnya sinergi antara Dinas Pariwisata dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai koordinator PAD. Hal ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, baik melalui pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan statistik antara variabel, maupun melalui strategi promosi wisata untuk menarik wisatawan. Namun, sebagian besar kajian tersebut belum secara mendalam membahas aspek pengelolaan retribusi sektor pariwisata dari perspektif siklus pengelolaan keuangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan anggaran, pembahasan dan penetapan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban.

Selain itu, masih terbatas kajian yang menyoroti peran digitalisasi dalam proses pemungutan retribusi pariwisata, padahal digitalisasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini mengisi kesenjangan

tersebut dengan mengkaji secara holistik pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Fokus penelitian yang tidak hanya deskriptif tetapi juga analitis ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konkret dalam membenahan tata kelola retribusi sektor pariwisata di daerah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks Pengelolaan Retribusi Pariwisata.

Penelitian pertama oleh Ariska (2017) yang berjudul Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi di kawasan wisata Pantai Parangtritis telah berkontribusi signifikan terhadap PAD Kabupaten Bantul, dengan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun.

Penelitian kedua oleh Wilda Hanifah (2023) yang berjudul Pengaruh Retribusi, Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pariwisata Halal terhadap PAD Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi objek wisata halal memiliki pengaruh negatif terhadap PAD, sementara jumlah kunjungan wisatawan dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif yang signifikan.

Penelitian Ketiga oleh Fathul Rahman (2015) yang berjudul Pengaruh Retribusi Pariwisata Pantai Bira Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi pariwisata Pantai Bira berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Bulukumba, dengan kontribusi sebesar 56,40% terhadap PAD.

Penelitian Keempat Mina Wati Dewi (2018) yang berjudul Pengaruh Retribusi Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi objek wisata berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Pandeglang, dengan kontribusi sebesar 27,6%.

Penelitian Kelima Devi Aisyah Septianti Tasidalle (2019) yang berjudul Retribusi Daerah Bidang Pariwisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi daerah bidang pariwisata berperan penting dalam meningkatkan PAD Kabupaten Jember, meskipun masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pengelolaannya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Karya Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah yang signifikan dibandingkan dengan lima penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, baik dari segi pendekatan, ruang lingkup pembahasan, maupun kedalaman analisis. Penelitian ini mengkaji secara menyeluruh proses pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menggunakan kerangka siklus pengelolaan keuangan daerah yang mencakup tahap perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Hal ini membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau menggunakan pendekatan kuantitatif tanpa mengeksplorasi lebih jauh tantangan di lapangan.

Jika dalam penelitian Ariska (2017) fokusnya adalah pada kontribusi retribusi Pantai Parangtritis terhadap PAD Kabupaten Bantul, maka penelitian ini tidak hanya mengukur kontribusi, tetapi juga menganalisis hambatan internal dan kelembagaan yang menghambat optimalisasi

penerimaan retribusi pariwisata. Begitu pula dalam penelitian Hanifah (2023) yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap PAD, penelitian ini justru mendekati masalah dari sisi kualitatif guna menggambarkan kondisi aktual di lapangan secara lebih mendalam, khususnya terkait minimnya SDM dan belum adanya digitalisasi.

Penelitian ini juga melampaui cakupan studi Rahman (2015) yang menyoroti pengaruh retribusi Pantai Bira terhadap PAD Kabupaten Bulukumba secara statistik, dengan mengangkat aspek-aspek struktural seperti belum dikenakannya retribusi pada sebagian besar objek wisata, keterbatasan anggaran, dan kurangnya sinkronisasi antarinstansi. Sementara itu, Dewi (2018) meneliti pengaruh retribusi objek wisata terhadap PAD tanpa membahas proses pengelolaan anggaran secara menyeluruh. Penelitian ini justru mengintegrasikan seluruh siklus pengelolaan keuangan berdasarkan teori Soleh dan Rochmansjah (2010), sehingga memberikan perspektif yang lebih lengkap dalam menilai efektivitas kebijakan retribusi pariwisata.

Selanjutnya, penelitian Tasidalle (2019) menyoroti peran retribusi pariwisata sebagai sumber PAD, namun belum secara rinci menjabarkan strategi dan inovasi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkannya. Dalam konteks ini, penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui analisis terhadap upaya-upaya nyata pemerintah daerah, seperti pembaruan regulasi retribusi, pengembangan sistem digital, diversifikasi produk wisata, serta penerapan monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi.

Dengan demikian, kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang komprehensif, penggunaan kerangka analisis siklus pengelolaan keuangan daerah, dan fokus pada hambatan serta strategi yang dapat dijadikan acuan dalam menyempurnakan tata kelola retribusi sektor pariwisata di tingkat daerah. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran situasi aktual, tetapi juga menawarkan solusi berbasis bukti untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD secara berkelanjutan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Faktor Penghambat serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi sektor pariwisata.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Pranee Liamputtong dalam bukunya *Qualitative Research Methods* (2020), berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan interaksi manusia dalam konteks sosial tertentu. Metode ini mencakup berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dengan cara yang lebih holistik. Selanjutnya menurut Fatimah (2019), pendekatan kualitatif lebih cenderung digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial karena dalam penelitian kualitatif, data dan proses penelitiannya lebih menekankan pada makna, konteks, dan interpretasi sosial.

Metode penelitian kualitatif, yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek yang alami dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggabungkan beberapa sumber melalui triangulasi, serta menganalisis data secara induktif dengan fokus pada

makna daripada generalisasi (Nurdin & Hartati, 2019:42). Selanjutnya, menurut Bogdan dan Taylor (dalam Ruskarini, 2017:10), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Dengan menerapkan metode kualitatif pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat. Melalui metode ini, peneliti mengeksplorasi perspektif para pegawai yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana pengelolaan retribusi sektor pariwisata dialami oleh para PNS di Dinas Pariwisata, hambatan-hambatan apa saja yang mereka hadapi, serta upaya yang dilakukan oleh instansi dalam mengatasi tantangan tersebut.

Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan mendalam guna menangkap makna dan konteks sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Setiap penelitian kualitatif dalam pemerintahan dapat memiliki variasi dalam desainnya, karena disesuaikan dengan sifat alami dari penelitian kualitatif itu sendiri yang bersifat dinamis, di mana fenomena dapat muncul secara tiba-tiba sesuai dengan prinsip alami (Simangunsong, 2017:190).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sugiyono (2016:225) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, seperti angket, wawancara, pengamatan, ujian, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat. Informan penelitian, seperti yang disampaikan oleh Moleong (2015:163), adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan individu yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui dan menjelaskan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Peneliti menggunakan Konsep Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Soleh & Rochmansjah, 2010), yang memiliki 4 dimensi yaitu:

1. Perencanaan Anggaran.
2. Pembahasan dan Penetapan Anggaran.
3. Pelaksanaan Anggaran.
4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran.

3.1 Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat

Dimensi Perencanaan Anggaran, Dimensi ini menekankan pentingnya tahap awal dalam pengelolaan keuangan yang mencakup proses penyusunan anggaran secara sistematis dan strategis. Dalam konteks pengelolaan retribusi pariwisata, perencanaan anggaran harus mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan sektor pariwisata dan memperkirakan sumber pendapatan yang realistis. Indikator yang digunakan adalah:

1. Kesesuaian dengan RAPBD: Menilai sejauh mana rencana anggaran sektor

- pariwisata selaras dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Partisipasi Stakeholder: Mengukur tingkat keterlibatan pihak-pihak terkait (seperti Dinas Pariwisata, Bappeda, Bapenda, DPRD) dalam penyusunan anggaran.
 3. Perencanaan Infrastruktur dan Fasilitas: Melihat sejauh mana perencanaan mengakomodasi kebutuhan infrastruktur dan sarana pendukung pariwisata yang dapat mendukung peningkatan retribusi.

Dimensi Pembahasan dan Penetapan Anggaran, Dimensi ini mengkaji proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk mengesahkan rencana anggaran, termasuk alokasi anggaran untuk sektor pariwisata. Indikatornya meliputi:

1. Kesesuaian Objek Wisata terhadap Tarif Retribusi: Menilai apakah objek wisata yang dikelola telah ditetapkan tarif yang sesuai dengan potensi dan nilai ekonomi yang dihasilkan.
2. Estimasi Pendapatan: Melihat keakuratan estimasi target pendapatan dari sektor retribusi pariwisata.
3. Kesesuaian dengan Peraturan yang Ada: Menilai apakah proses penetapan anggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Perda tentang retribusi daerah.

Dimensi Pelaksanaan Anggaran, Dimensi ini berfokus pada tahap implementasi anggaran yang telah direncanakan dan disetujui. Pelaksanaan yang baik akan berdampak langsung pada capaian PAD dari sektor pariwisata. Indikator pelaksanaan meliputi:

1. Proses Pelaksanaan Anggaran: Menilai bagaimana dana dikelola dan digunakan untuk menunjang operasional dan pengembangan sektor pariwisata.
2. Efisiensi dan Efektivitas dalam Pelaksanaan Kegiatan: Mengukur seberapa optimal dana digunakan dalam pelaksanaan program, serta hasil yang dicapai.
3. Kepatuhan terhadap Prosedur Anggaran: Menilai apakah pelaksanaan mengikuti prosedur administrasi dan keuangan yang telah ditetapkan.

Dimensi Pertanggungjawaban Anggaran, Tahapan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan anggaran, di mana setiap penggunaan dana harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik maupun lembaga pemeriksa. Indikator yang digunakan adalah:

1. Transparansi dalam Pertanggungjawaban Retribusi: Menilai keterbukaan informasi mengenai pengelolaan retribusi, termasuk laporan keuangan.
2. Hasil Pemeriksaan: Melihat hasil audit dari lembaga seperti Inspektorat atau BPK terkait dengan pengelolaan anggaran retribusi.
3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan: Menilai sejauh mana rekomendasi dari hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh dinas terkait..

3.2 Faktor Penghambat Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat

Pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat menghadapi berbagai hambatan yang berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat lima faktor utama yang menghambat optimalisasi pengelolaan retribusi pariwisata.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Retribusi

Keterbatasan sumber daya dari segi kuantitas merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat Wang et al (2025) mengatakan bahwa ada korelasi negatif antara beban kerja yang dirasakan dan keterlibatan kerja. Jumlah petugas yang melakukan pendataan, penarikan dan pengawasan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah objek wisata yang ada. Hal ini menyebabkan penarikan retribusi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan konsisten di seluruh objek wisata yang ada. Hal ini sejalanannya juga dengan penelitian yang dilakukan Amalia (2021) ditemukan bahwa dalam penelitiannya kekurangan pahaman SDM terhadap IT (Information and Technology) terjadi karena jumlah pegawai yang menginput data hanya berjumlah satu orang. Sehingga, hal ini juga membuat lambatnya proses penerbitan kartu keluarga ataupun mengubah identitas kartu keluarga di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Solok Provinsi Sumatera Barat.

2. **Potensi Sumber Daya Pariwisata yang Belum Dikenakan Retribusi**

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pariwisata yang beragam namun belum dioptimalkan dari segi penarikan retribusi. Beberapa objek wisata, terutama wisata alam dan budaya yang baru belum berkembang dan belum memiliki sistem retribusi yang jelas. hanya satu objek yang dikenakan tarif retribusi yaitu kawasan wisata bogam raya yang merupakan bagian dari wisata alam di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini menjadi hambatan bagi Dinas Pariwisata untuk memaksimalkan penerimaan retribusi yang bersumber hanya dari satu objek wisata.

3. **Belum Diterapkannya Sistem Berbasis Digital Dalam Pelaksanaan Retribusi**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amin et al (2025) mendorong bisnis untuk memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh teknologi digital baru dan tren digitalisasi di seluruh industri dengan mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan kapabilitas digital mereka untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi serta kinerja pemasaran mereka. Namun, Era digitalisasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mengelola retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sistem penarikan retribusi masih dilakukan dengan cara konvensional yaitu menggunakan karcis atau tiket fisik yang rentan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan. sistem digital terbukti lebih efektif dilaksanakan dibandingkan dengan sistem manual/konvensional. Oleh karena itu, belum adanya sistem berbasis digital memperlambat proses administrasi, transportasi data, pemantauan dan evaluasi penarikan retribusi secara real-time.

4. **Keterbatasan Anggaran dalam Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata.**

Faktor penghambat selanjutnya adalah keterbatasan anggaran yang digunakan dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata. Minimnya anggaran operasional berdampak pada terbatasnya infrastruktur pendukung penarikan retribusi, seperti pos retribusi yang representatif, peralatan pendukung, serta anggaran perawatan kebersihan kawasan wisata. anggaran yang dikeluarkan untuk mengelola retribusi ini terbatas meskipun pariwisata masuk dalam program prioritas wakil kepala bupati Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterbatasan anggaran juga memengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi kebijakan retribusi kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Kurangnya pemahaman publik mengenai pentingnya retribusi bagi pengembangan pariwisata dan peningkatan pendapatan asli daerah berpotensi menimbulkan resistensi dalam pembayaran retribusi. Selain itu, minimnya anggaran untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan retribusi menyebabkan

rendahnya tingkat kepatuhan dalam pembayaran retribusi pariwisata.

5. Belum Sinkronnya Visi dan Misi Antara Bapenda dan Dinas Pariwisata
Permasalahan koordinasi kelembagaan menjadi faktor penghambat tersendiri dalam pengelolaan retribusi pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kurangnya sinkronisasi visi dan misi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Pariwisata menyebabkan perbedaan prioritas dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata. Bapenda cenderung mengutamakan aspek peningkatan pendapatan, sementara Dinas Pariwisata lebih fokus pada aspek pengembangan pariwisata dan kenyamanan wisatawan.

3.3 Upaya yang telah di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan retribusi pariwisata

Berikut ini adalah analisis mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan PAD melalui pengelolaan retribusi pariwisata.

1. Pembaruan Regulasi dan Dasar Hukum
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah melakukan pembaruan regulasi dan dasar hukum terkait pengelolaan retribusi pariwisata. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pemungutan retribusi serta menyesuaikan tarif retribusi dengan kondisi ekonomi terkini. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan pembaharuan regulasi melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010. Pembaharuan ini secara signifikan memperluas cakupan objek retribusi pariwisata dengan mengidentifikasi 15 objek retribusi baru termasuk wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya yang sebelumnya tidak tercakup dalam regulasi lama.
2. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Objek Wisata
Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan infrastruktur dan fasilitas objek wisata. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyadari bahwa kualitas infrastruktur dan fasilitas objek wisata sangat mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung, yang pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan dari retribusi. Upaya peningkatan infrastruktur dan fasilitas objek wisata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut dilakukan untuk memberikan dampak positif terhadap pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan upaya tersebut juga diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan menambah jumlah dan intensifikasi wisatawan mengunjungi tempat wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Diversifikasi Atraksi dan Produk Wisata
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga berupaya melakukan diversifikasi atraksi dan produk wisata untuk menarik lebih banyak pengunjung dan memperpanjang lama tinggal wisatawan. Diversifikasi ini dilakukan melalui pengembangan berbagai jenis wisata seperti wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, dan wisata edukasi. beberapa diversifikasi atraksi dan produk wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas objek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat. Salah satu contoh keberhasilan diversifikasi produk wisata adalah pengembangan Taman Nasional Tanjung Puting di Kecamatan Kumai yang menawarkan pengalaman wisata berbasis masyarakat. Wisata ini tidak hanya menarik minat wisatawan domestik tetapi juga wisatawan mancanegara, terutama mereka yang tertarik

dengan konservasi orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting.

4. Promosi dan Pemasaran Destinasi Wisata

Promosi dan pemasaran destinasi wisata merupakan aspek krusial dalam strategi pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai pendekatan pemasaran terpadu yang bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan dan konsekuensinya mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi wisata. Upaya ini tercermin melalui pengembangan platform digital resmi yang memuat informasi komprehensif mengenai destinasi wisata unggulan daerah, seperti Pantai Kubu, Tanjung Keluang, dan Taman Nasional Tanjung Puting. Melalui website resmi dan media sosial, pemerintah daerah menawarkan visualisasi menarik, informasi akses, serta paket wisata yang didesain untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan. Program branding destinasi "Pesona Kotawaringin Barat" telah dikembangkan secara khusus untuk menciptakan identitas wisata yang unik dan mudah dikenali, mengedepankan keunggulan ekowisata dan keragaman budaya lokal sebagai daya tarik utama. Pendekatan ini diperkuat dengan produksi materi promosi berkualitas tinggi berupa brosur, video promosi, dan katalog digital yang didistribusikan secara luas. Selain itu, pengembangan aplikasi mobile "Wisata Kobar" memberikan akses informasi real-time mengenai destinasi wisata, termasuk fitur pembelian tiket elektronik yang secara langsung berkontribusi pada efisiensi pengelolaan retribusi dan transparansi pelaporan pendapatan.

5. Evaluasi dan Monitoring Berkala

Evaluasi dan monitoring merupakan komponen vital dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memastikan efektivitas kebijakan dan optimalisasi pendapatan. Pemerintah daerah telah mengimplementasikan sistem monitoring digital terintegrasi yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap arus kunjungan dan penarikan retribusi di setiap objek wisata. Data yang terkumpul dianalisis secara berkala melalui rapat evaluasi triwulanan yang melibatkan Dinas Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah, dan pengelola destinasi wisata untuk mengidentifikasi tren kunjungan, efektivitas strategi promosi, serta tingkat kepatuhan pembayaran retribusi. Selanjutnya Sistem pelaporan berjenjang telah dikembangkan untuk memastikan arus informasi yang lancar dari pengelola destinasi wisata hingga ke tingkat pengambil kebijakan, memungkinkan identifikasi cepat terhadap deviasi target pendapatan dan implementasi tindakan korektif. Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi dasar untuk penyempurnaan Peraturan Daerah terkait retribusi pariwisata, penyesuaian tarif yang proporsional, serta pengalokasian dana pemeliharaan infrastruktur pariwisata yang lebih tepat sasaran, menciptakan siklus kebijakan berbasis bukti yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan potensi retribusi pariwisata sebagai sumber PAD yang signifikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat masih menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum dikenakannya retribusi pada seluruh objek wisata, dan belum diterapkannya sistem digital dalam pengelolaan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kontribusi retribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Temuan ini selaras dengan penelitian Ariska (2017) di Kabupaten Bantul, yang menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik dalam meningkatkan retribusi wisata. Namun,

berbeda dengan penelitian Ariska yang lebih menekankan pada hasil kontribusi terhadap PAD, penelitian ini lebih fokus pada proses pengelolaan serta tantangan struktural dan kelembagaan yang dihadapi.

Hanifah (2023) dalam penelitiannya di Kabupaten Tanah Datar menemukan bahwa retribusi objek wisata halal justru berpengaruh negatif terhadap PAD, berbeda dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan potensi besar sektor pariwisata dalam menyumbang PAD jika dikelola secara optimal. Penelitian ini juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dan transformasi digital, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian Hanifah.

Penelitian Rahman (2015) di Kabupaten Bulukumba mengungkap bahwa retribusi pariwisata Pantai Bira menyumbang 56,4% terhadap PAD daerah tersebut. Sementara di Kotawaringin Barat, kontribusi retribusi pariwisata bahkan belum mencapai 1%, yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan dan potensi yang belum tergarap. Penelitian ini menyoroti perlunya digitalisasi dan perluasan cakupan objek retribusi.

Penelitian oleh Dewi (2018) di Kabupaten Pandeglang memperlihatkan pengaruh signifikan retribusi objek wisata terhadap PAD sebesar 27,6%. Temuan ini mendukung pentingnya pengelolaan retribusi yang terencana dan efektif. Namun, penelitian ini menambahkan analisis pada aspek kelembagaan dan digitalisasi yang belum dijelaskan secara mendalam dalam penelitian Dewi.

Sementara itu, Tasidalle (2019) menegaskan bahwa pengelolaan retribusi di Kabupaten Jember penting untuk meningkatkan PAD, namun menghadapi tantangan dalam optimalisasi. Penelitian ini melengkapi dengan menguraikan lebih dalam penyebab tantangan tersebut seperti belum sinkronnya visi antar instansi, keterbatasan anggaran, dan kurangnya infrastruktur pendukung retribusi pariwisata.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan penulis di lapangan selama masa penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Retribusi sektor Pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat telah berjalan dengan baik dibuktikan dengan 8 dari 12 indikator sudah sesuai berdasarkan teori pengelolaan keuangan Chabib & Rochmansyah dan analisis dari penulis, namun ada beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi: Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata, antara lain: Potensi Sumber Daya Pariwisata yang Belum dikenakan Retribusi, Belum diterapkannya sistem elektronik dalam penarikan retribusi sehingga penarikan masih dilakukan secara manual menggunakan karcis, Keterbatasan Anggaran dalam Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dan Belum Sinkronnya Visi Dan Misi Antara Bapenda dan Dinas Pariwisata. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD melalui pengelolaan retribusi sektor pariwisata, antara lain: Pembaharuan regulasi terkait retribusi pariwisata untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan potensi pariwisata terkini, termasuk penyesuaian tarif retribusi yang lebih realistis, Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Objek wisata untuk meningkatkan kualitas tempat wisata, Diversifikasi Atraksi dan Produk Wisata untuk menambah daya tarik wisatawan, Penguatan Sistem Penarikan dan Pengelolaan Retribusi untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata, Promosi dan Pemasaran Destinasi Wisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan Kerjasama dengan Pihak Swasta serta melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata serta Evaluasi dan Monitoring untuk menjaga kualitas dari tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan di satu instansi pemerintahan saja yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2021) Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Melalui Tanda Tangan Elektronik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Solok Provinsi Sumatera Barat
- Amin, M., Gohar, M., & Ali, I. (2025). *Impact of digital transformation on SME's marketing performance: Role of social media and market turbulence*. *Discover Sustainability*, 6(1), 378. <https://www.scopus.com/pages/publications/105004453205>
- Ariska. (2017). *Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses dari <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17074>
- Castilho, D., & Fuinhas, J. A. (2025). *Exploring the effects of tourism capital investment on income inequality and poverty in the European Union countries*. *Journal of Economic Structures*, 14(1), 6 <https://www.scopus.com/pages/publications/86000763904>
- Dewi, M. W. (2018). *Pengaruh Retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang)*. Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Diakses dari <https://repository.uinbanten.ac.id/1550/>
- Fatimah. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hanifah, W. (2023). *Pengaruh Retribusi, Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pariwisata Halal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74403>
- Liamputtong, P. (2020). *Qualitative Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, M., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Studi dalam Ilmu Sosial dan*

Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.

- Rahman, F. (2015). Pengaruh Retribusi Pariwisata Pantai Bira Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. Skripsi, UIN Alauddin Makassar. Diakses dari <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/9821/>
- Ruskarini, T. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Deepublish.
- Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tasidalle, D. A. S. (2019). Retribusi Daerah Bidang Pariwisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember. Skripsi, Universitas Jember. Diakses dari <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/93447>
- Wang, H., Sun, Y., Wang, W., & Liang, H. (2025). *Exploring the relationship between teachers' perceived workload, challenge-hindrane stress, and work engagement: A person-centered approach*. *Teaching and Teacher Education*, 126, 104120. <https://www.scopus.com/pages/publications/86000113440>

